

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**INSTANSI/SKPD: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY**

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualikan	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1	2	3	4	5	6
1.	Data pribadi pegawai	UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo UU No 43 Tahun 1999	Selama yang bersangkutan menjadi PNS atau mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi , melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 - Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
3.	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 - Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas Penilaian
4.	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Kepmendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah	Sampai audit selesai	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose
5.	Daftar nilai DP3/ SKP PNS	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i PP no.10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS pasal 6	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualikan	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1	2	3	4	5	6
6.	Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	PP Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS	Sampai diterbitkannya SK	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
7.	Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
8.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R).	Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatanaskah Dinas di Prov. DIY	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat Kebijakan Pimpinan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Sekretaris

R. HERY SULISTIO HERMAWAN, S.Pi, MT.  
NIP. 197102161999031003